PERKOSAAN MASAL :Catatan untuk Sri Mulyono

Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, akhirnya pemerintah secara resmi mengakui dan mengutuk terjadinya perkosaan masal pertengahan Mei lalu. Pengakuan ini disertai pembentukan Komisi Antikekerasaan terhadap Perempuan dan Tim Pencari Fakta untuk mengusut kejadiannya. Tapi toh masih muncul pemikiran seperti diungkapkan Sri Mulyono dalam artikel berjudul *Benarkah Terjadi Perkosaan Masal?* di harian ini edisi 2/8/1998 yang mengatakan bahwa pemberitaan tentang perkosaan sekadar "upaya sistematis" menjatuhkan citra Indonesia di mata dunia internasional.

Ada beberapa isu krusial lainnya di dalam artikel itu. Pertama, menyangkut ketepatan pemberitaan media massa di Indonesia. Menurut Sri Mulyono, berita-berita tersebut dibuat tanpa diperiksa kebenarannya, sedangkan penyidikan pihak polisi kesulitan mendapat data konkret karena sedikit korban yang melapor. Pemberitaan media massa, termasuk di Indonesia, sering tak mencerminkan keadaan sebenarnya. Bahkan tingkat distorsinya di Indonesia cukup tinggi dibanding negara-negara lain. Selain kecenderungan mensensasionalisasi berita demi meningkatkan penjualan, banyak faktor eksternal -- seperti intimidasi, supresi, atau "pengarahan" informasi oleh pihak luar untuk kepentingan suatu kelompok atau penguasa.

Hal ini berlaku juga untuk kasus perkosaan masal. Perdebatan mengenai akurasi pemberitaan dapat menjadi tidak berkesudahan. Namun, pertanyaan bisa dibalik: Apa yang menjadi dasar untuk menerima teori bahwa pemberitaan media massa hanya bagian dari usaha sistematis untuk menjelekkan citra Indonesia di mata dunia? Apa bukti untuk mendukung pernyataan Eddy Noor yang disitir Sri Mulyono serta pernyataan Kapolri Letjen Roesmanhadi pada pertengahan Agustus ini, bahwa perkosaan hanya terjadi pada satu dua orang, namun dibesar-besarkan aktivis LSM? Jika perkosaan sulit dibuktikan, sebaliknya juga sulit dibuktikan bahwa **tidak terjadi.**

Isu krusial kedua adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kompleksitas perkosaan. Perkosaan tak sama dengan kejahatan lain. Berbeda dengan pencurian,

perampokan, atau pengrusakan, korban perkosaan selain terguncang jiwanya juga malu untuk melaporkan musibah yang dialaminya. Tanggapan orang juga tak selalu simpati, ikut prihatin, atau ingin menolong. Malah korban sering dipandang sebelah mata, bahkan dikucilkan. Perkosaan juga unik karena sifatnya yang merampas harga diri si korban, suatu "komoditas" yang tak ternilai, dan yang lebih penting lagi, tak tergantikan. Harga diri kita tak akan berkurang akibat dompet kita dicopet atau rumah kita dibobol maling, misalnya.

Ini sebabnya sangat sedikit korban perkosaan yang melapor. Buat apa menambah derita dengan merekonstruksi kejadian dan menjalani pemeriksaan tubuh yang sangat memalukan? Padahal ini merupakan prosedur standar jika melapor ke pihak berwajib. Selain itu, rasa malu si korban juga semakin menumpuk karena dengan melapor, semakin banyak orang yang tahu mengenai musibahnya. Jadi apa motivasi mereka untuk melapor? Toh mereka tetap harus menanggung trauma kejadian tersebut seumur hidupnya, meski pelakunya bisa tertangkap dan dihukum sekalipun.

Dalam perkosaan medio Mei, terdapat kasus-kasus di mana KTP korban dirampas oleh si pemerkosa (laporan dari *Human Rights Watch*, 10/8/1998). Sebagai akibatnya, si pemerkosa mengetahui nama dan alamat korban. Apabila perkosaan ini adalah bagian dari program intimidasi yang terencana, mungkin saja disebarkan ancaman tindakan pembalasan bagi korban yang berani melapor.

Tak semua orang tahu mengenai perkosaan masal sebagai metode yang lazim digunakan dalam situasi perang -- untuk melumpuhkan suatu golongan etnis demi tujuan-tujuan tertentu: Merebut wilayah, menguasai sistem ekonomi, atau mengambil alih kekuasaan politik, yang semula dimiliki oleh golongan tersebut. Contohnya banyak sekali: Kamboja, Korea, Somalia, Peru, dan yang paling terkenal di Bosnia -- di mana penghancuran harga diri mereka sebagai bangsa dilakukan dengan cara memperkosa perempuan muslim Bosnia secara sitematis oleh tentara Serbia. Kasus Bosnia diakui secara internasional. Contoh-contoh di dalam negeri juga cukup banyak: Di Timor Timur, Irian Jaya, dan -- yang sekarang sedang hangat dibicarakan -- di Aceh. Kesaksian yang jumlahnya sangat besar menjadikan sulit dipungkiri bahwa hal-hal seperti ini memang benar-benar terjadi.

Kenyataan ini juga sekaligus menjawab pandangan Eddy Noor bahwa: "... suasana panik manusia berhamburan, sehingga sulit bagi orang untuk melakukan perzinahan... suasana saat itu kurang mendukung untuk terjadinya pemerkosaan." Istilah "zinah" di sini tidak tepat, karena zinah adalah hubungan seksual antara dua orang di luar perkawinan secara suka rela, tanpa pemaksaan. Yang terjadi pada kerusuhan 13-15 Mei bukanlah tindakan seksual melainkan tindak kekerasan, di mana satu pihak

memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lain. Selain itu, perkosaan dengan tujuan di atas tidak memerlukan birahi, apalagi jika dilakukan dengan tongkat, bambu, pisau, atau benda lainnya. Jelas, perkosaan dalam konteks kerusuhan merupakan tindak agresi dan bukan pelampiasan birahi.

Isu krusial terakhir yang ingin saya angkat adalah mengenai proses pemahaman situasi yang mengerikan ini dalam pikiran dan jiwa seseorang. Bagaimanakah kita bereaksi ketika kita membaca berita-berita tersebut? Ada banyak unsur dalam insiden perkosaan ini: Kekerasan, kekuasaan, hubungan gender, intimidasi, militer, Islam, etnis Cina, ekonomi, politik, dan masih banyak lagi. Unsur apakah yang paling menjadi fokus perhatian kita?

Reaksi setiap orang terhadap berita perkosaan ini sangatlah subjektif. Contohnya adalah kasus yang diangkat Sri Mulyono, yaitu pengaduan majalah *Jakarta-Jakarta* oleh Komite Indonesia untuk Solidaritas Islam (Kisdi) ke Menpen karena artikel mengenai *Vivian* yang "... secara lugas menuduh umat Islam sebagai dalang perkosaan". Interpretasi terhadap pernyataan ini bisa mempunyai dampak yang cukup berbeda bagi setiap pemeluk agama Islam. Sebagai orang Islam, saya secara pribadi yakin bahwa agama yang saya anut ini cukup kuat untuk tidak tergoyahkan oleh suatu pernyataan di media massa. Patut disesali bila umat Islam langsung bereaksi secara emosional terhadap sesuatu yang belum jelas, dan terseret ke dalam suatu konteks tuding-tudingan yang tak ada akhirnya. Padahal yang diperlukan di sini justru kebesaran umat Islam untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan demikian, umat Islam bisa berperan dalam proses terciptanya kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi dan kerukunan yang nyata, bukan yang semu dan rapuh seperti yang terjadi selama ini.

Etnisitas adalah aspek lain yang menjadi pusat perhatian kasus perkosaan ini, khususnya kekurangan-kekurangan etnis korban perkosaan -- bahwa orang Cina itu sombong, rakus, tidak mau berbaur -- seolah-olah hal ini dapat membenarkan tindakan keji yang dilakukan terhadap mereka. Aspek-aspek lain yang difokuskan adalah: "Citra bangsa", pertentangan antara pemerintah dan LSM, tidak kooperatifnya korban perkosaan, dan sebagainya.

Bagaimana jika yang diperkosa bukan dari kelompok etnis Cina, dan bukan dari kelompok yang dianggap dalam posisi diuntungkan dalam bidang ekonomi? Bagaimana jika Tim Relawan tidak dipimpin oleh seorang pendeta Katolik? Bagaimana jika yang "tercoreng" oleh kasus ini bukanlah umat Islam, tapi umat agama lain? Bagaimana jika yang diperkosa dari suku lainnya, misalnya Minang, Batak, atau Bali? Apakah reaksi masyarakat tetap sama?

Sebagai manusia, kita tak luput dari berbagai prasangka dan pola pikir yang sudah bertahun-tahun terbentuk oleh lingkungan, pendidikan, dan pengalaman pribadi maupun kolektif sebagai anggota dari kelompok etnis, agama, dan kelas sosial tertentu. Ketika kita dibombardir oleh berbagai informasi di media massa, prasangka inilah yang menjadi "selektor" arus berita yang kita terima. Jika informasi tersebut berpotensi menggoyahkan nilai-nilai yang kita jadikan pegangan hidup dan perangkat untuk membenarkan tindakan-tindakan kita, maka prasangka menjadi "tameng" (*defence mechanism*) yang melindungi kita. Kita lantas kehilangan akal dan menjadi budak prasangka kita sendiri.

Marilah kita lihat kasus perkosaan ini dari hati nurani yang paling dalam. Lepaskanlah berbagai atribut etnis, agama, "nasionalisme", kepentingan ekonomi, atau politik, agar kita mampu melihat permasalahan secara hakiki: Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang mempunyai hak untuk memperkosa manusia lain, apa pun alasannya. Perkosaan adalah suatu tindak kejahatan yang amat biadab, siapa pun korbannya.

Marilah kita hadapi kenyataan bahwa peristiwa yang mengerikan ini telah terjadi di tanah air kita. Sebagai warga negara Indonesia, kita semua turut menanggung akibatnya meski dengan cara yang berbeda-beda. Kasus perkosaan bulan Mei dan sesudahnya mutlak harus diusut dan diungkapkan secara tuntas. Upaya untuk menuju ke arah itu jangan sampai kehilangan momentum hanya karena dibebani oleh berbagai polemik yang tidak relevan dalam pemecahan kasus ini. Hanya dengan mengungkap tuntas peristiwa ini kita bisa menarik pelajaran dari musibah tersebut, dan memastikan agar hal ini tidak akan pernah terulang lagi di masa yang akan datang. Hanya dengan cara itulah kita bisa memulai proses penyembuhan hati nurani bangsa kita.

Aditya Priyawardhana
Jakarta

Diterbitkan oleh Republika Online
Hak Cipta © PT Abdi Bangsa 1998
Site dikelola oleh PT Indonesia Media Internet (IMN)